



PENGADILAN NEGERI BINTUHAN
KELAS II

2022



LAPORAN SAKIP TAHUN 2021

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

PENGADILAN NEGERI BINTUHAN



Jl. Pengadilan - Padang Kempas, Kec, Kaur Selatan Kab. Kaur



www.pn-bintuhan.go.id



(0739) – 6180034



pnbhn@pn-bintuhan.go.id

RENCANA KERJA TAHUNAN

TAHUN 2022



PENGADILAN NEGERI BINTUHAN KELAS II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BINTUHAN KELAS II NOMOR W8.U5/(6.6/OT.01.1/1/2021)

TENTANG PENETAPAN RENCANA KINERJA TAHUNAN 2022 PENGADILAN NEGERI BINTUHAN

KETUA PENGADILAN NEGERI BINTUHAN KELAS II

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
b. bahwa dengan telah dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2020-2024 maka Pengadilan Negeri Bintuhan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja;
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
7. Peraturan Presiden Noor 14 tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
8. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
9. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
11. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penentapan Kinerja serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BINTUHAN KELAS II TENTANG PENETAPAN RENCANA TAHUNAN PENGADILAN NEGERI BINTUHAN TAHUN 2022;**
- Pertama : Reviu Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Negeri Bintuhan Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan acuan kerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Bintuhan dalam melaksanakan Perjanjian Kinerja, menyampaikan Rencana Kinerja dan Anggaran, Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bintuhan tahun 2020-2024 ;
- KEDUA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan satuan kerja dan disampaikan kepada Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Bintuhan
Pada tanggal 07 Januari 2021
**KETUA PENGADILAN NEGERI
BINTUHAN KELAS II**



PURWANTA, S.H., M.H.
NIP. 197901112001121003

Tembusan :

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu;
2. Arsip

RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN 2022 PENGADILAN NEGERI BINTUHAN

lo	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran / Rp
	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara yang diselesaikan Ditingkat Pertama	Jumlah Perkara yang masuk tahun 2022	70 Perkara	Rp. 55.292.000,-
				Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Gaji dan Tunjangan Hakim dan Pegawai Tahun 2022	Jumlah Hakim dan Pegawai Tahun 2022	21 Orang Pegawai	Rp. 2.699.339.000,-
					Operasional dan Non Operasional Perkantoran	Realisasi Belanja Bahan Dan Belanja Barang	95 %	Rp. 1.198.443.000,-
					Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	4 Unit	Rp. 37.000.000,-

b. Persentase penurunan perkara - Perdata - Pidana	50%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara yang diselesaikan Ditingkat Pertama	Jumlah Perkara yang masuk tahun 2022
c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : a. Banding b. Kasasi c. Peninjauan Kembali	90%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penanganan Perkara Banding di Tingkat Pertama	Jumlah Perkara yang mengajukan upaya Hukum Banding
d. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi	50%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara yang diselesaikan Ditingkat Pertama	Jumlah Perkara yang masuk tahun 2022

e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian	85%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Layanan Bantuan Hukum	Layanan yang diberikan kepada pencari keadilan	240 Layanan	Rp. 24.000.000
			Pembebasan Biaya Perkara	Jumlah Perkara Prodeo	0	Rp. 0	
a. Persentase isi putusan diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara yang diselesaikan Ditingkat Pertama	Jumlah Perkara yang masuk tahun 2017	70 Perkara	Rp. 29.792.000,-	
b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	20 %	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara yang diselesaikan Ditingkat Pertama	Jumlah Perkara yang masuk tahun 2022	70 Perkara	Rp. 29.792.000,-	
c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK lengkap dan tepat waktu	100 %	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penanganan Perkara Banding di Tingkat Pertama	Jumlah Perkara yang mengajukan upaya Hukum Banding	6 Perkara	Rp. 1.260.000,-	

		Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Tingkat Pertama	Jumlah Perkara yang mengajukan upaya hukum Kasasi dan PK	6 Perkara	Rp. 1.260.000,-
d. Persentase putusan perkara menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	Fengadilan Negeri Bintuhan Tidak bervenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tipikor				
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	10%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Pembebasan Biaya Perkara Prodeo	1 Perkara	Rp. 0,-
b. Persentase perkara diselesaikan di luar gedung pengadilan	PN Bintuhan tidak memiliki setting pleatz				

	c. Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Layanan Bantuan Hukum	Layanan yang diberikan kepada pencari keadilan	240 Layanan	Rp. 24.000.000,-
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dierekusi)	10%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Esekusi	Jumlah Eksekusi	2 Perkara	Rp. 0,-



Bintuhan, Januari 2022

Kuasa Pengguna Anggaran

SAMIDI, S.H.
NIP. 19690317 199303 1004